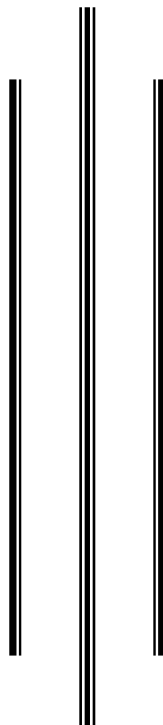




**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/ 7 /I/REN.2.3./2023

Tentang

RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 7. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Renstra Polda Sumbar Tahun 2020-2024.

2 KEPUTUSAN IRWADA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/7/I/REN.2.3./2023
TANGGAL: 9 JANUARI 2023

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/52/I/2022 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2024;
2. Pagu Ideal Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.**

1. Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 9 Januari 2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BERLAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	24
2. Identifikasi Masalah	25
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	25
a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar.....	25
b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar.....	26
4. Tujuan	27
a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2024	27
b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024	27
5. Sasaran Prioritas Tahun 2024	28
a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar	28
b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar.....	28
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2024	29
7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024 ..	48
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU IDEAL TAHUN 2024	
8. Program kegiatan	51
9. Pagu Indikatif	51
V PENUTUP	
10. Penutup	52
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RKT	
2. RKA-KL	

**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2023, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024. Rancangan Rencana Kerja T.A. 2024 Itwasda Polda Sumbar ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Itwasda Polda Sumbar 2020-2024. disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Itwasda Polda Sumbar telah menunjukkan keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator, menurunnya pelanggaran atau kesalahan administrasi, terlaksananya Operasi Kepolisian di Jajaran Polda Sumbar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atas perilaku anggota Polri khususnya Polda Sumbar dilapangan, terlaksananya kegiatan verifikasi, terwujudnya laporan satuan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan pelayanan maksimal terhadap setiap pengaduan dari masyarakat.

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) Audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) Reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) Evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasda Polda Sumbar di dukung oleh Subbag dan Irbid. Tugas dan fungsi Subbag dan Irbid dapat kita lihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Perkembangan lingkungan strategis nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Ranrenja Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1). Geografi

- a) Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, propinsi Sumatera barat terletak disebelah barat pulau Sumatera.
- b) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng Indo australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain: retakan/patahan disepajang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan retakan/patahan Mentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai bagian barat Kep. Mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia / zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dengan kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Merapi di daerah Bukittinggi/Tanah Datar dan dan Gunung Talang di wilayah Kabupaten Solok, sehingga Sumbar merupakan daerah rawan bencana Gempa bumi berupa gunung meletus maupun gempa bumi tektonik yang berpotensi timbulnya tsunami.
- c) Sumatera Barat
Wilayah Sumatera Barat merupakan jalur perlintasan yang menghubungkan antar Provinsi di pulau Sumatera melalui jalur darat dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Propinsi Bengkulu yang mobilitasnya sangat padat dan rentan terjadinya konflik perbatasan,

konflik

konflik sosial, konflik agraria perkebunan, tambang, penyelundupan dan kriminalitas lainnya.

- d) Wilayah Sumatera Barat yang memiliki luas lebih kurang 42.297,30 km berupa daratan dan lautan terdiri dari 391 Pulau pulau kecil dan besar yang berhadapan dengan samudera Hindia yang merupakan perlintasan jalur ekonomi internasional yang rentan terjadinya gangguan kamtibmas (penyelundupan, terorisme, pencurian ikan, illegal logging, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya).
- e) Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km² atau sekitar 14,21% luas Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil yaitu 23,0 Km² atau 0,05% dari luas propinsi Sumbar.
- f) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.
- g) Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah yaitu danau singkarak, danau diatas dan danau dibawah terletak di Kabupaten Solok, danau maninjau terletak di Kabupaten Agam serta terdapat gugusan gunung yang hampir diseluruh Kabupaten / kota gunung yang paling tinggi adalah gunung Talamau di kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian lk 2.913 meter dari permukaan laut serta adanya gunung yang aktif masing-masing Gunung Merapi di wilayah Kab/Kota Padang Panjang/Tanah Datar, Gunung Talang terletak di Kabupaten Solok.
- h) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km² atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.

2). Demografi

- a) Jumlah penduduk Sumbar berdasarkan tahun 2022 sebanyak 5.640.629 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.841.802 jiwa dan perempuan sebanyak 2.798.827 jiwa, Menurut kabupaten dan kota jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang 919.145 jiwa sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya 57.850 jiwa, Kota yang terpadat penduduknya adalah Bukittinggi yaitu mencapai 5.102 jiwa/ km², sedangkan

kabupaten

kabupaten yang terjarang penduduknya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya 15 jiwa/km².

- b) Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2022 rata-rata 132/KM², kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi hampir 4.941/Km² dan penduduk terjarang adalah Kab. Kepulauan Mentawai yaitu 14,46 orang per Km². Penduduk Sumbar Mayoritas terdiri dari suku Minangkabau, sedangkan dalam jumlah kecil terdiri suku Jawa, Batak, Aceh, Melayu, Nias, Cina.
- c) Penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual masyarakat, Namun keberadaan agama lainnya tetap memperoleh tempat untuk berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
- d) Pertambahan penduduk di Sumatera Barat setiap tahun sekitar 1 s/d 2 % dengan penyebarannya yang tidak merata serta terjadinya peningkatan angkatan kerja sedangkan lapangan kerja sangat terbatas/tidak seimbang sehingga terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Sumbar, makin tingginya pengangguran dan kemiskinan sehingga rentan terjadinya gangguan kamtibmas.
- e) Propinsi Sumatera Barat juga merupakan wilayah yang didiami oleh penduduk yang heterogen dari berbagai macam agama dengan prosentase pemeluk agama tahun 2022:
 - 1) Agama Islam sebanyak 97,6 %
 - 2) Agama Protestan sebanyak 1,5 %
 - 3) Agama Khatolik sebanyak 0,84 %
 - 4) Agama Hindu sebanyak 0,0056 %
 - 5) Agama Budha sebanyak 0,84 %
 - 6) Agama lainnya sekitar 0,0158 %

3) Sumber Daya Alam

- a) Sumber Daya Alam di Propinsi Sumatera Barat sebagai penghasil Devisa Negara relatif kecil dibandingkan dengan propinsi lain disektor pertanian adalah Cacao, Cengkeh, kelapa sawit, gambir, kulit manis, disektor industri adalah semen padang, kondisi tersebut disamping jumlahnya relatif kecil dan belum tereksplorasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, disamping adanya indikasi investor asing takut masuk ke Sumbar dikarenakan adanya polemik dan masalah pembebasan tanah yang cukup rumit dan sulit, sehingga memberatkan para investor itu sendiri bila akan menanamkan sahamnya ke Wilayah Sumbar.

b) Sumber

- b) Sumber daya alam lainnya yang potensial dikembangkan di wilayah Sumatera Barat adalah kelautan, Perikanan, keindahan alam pesisir pantai dan laut seperti di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat sedangkan kepulauan Mentawai berupa keindahan Pantai dan Keindahan alam bawah laut, untuk kegiatan menyelam dan berenang, surfing/peselancar serta pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk wisata.
- c) Masyarakat Sumatera Barat memiliki budaya yang khas serta memiliki keindahan alam yang mengagumkan sehingga dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik lokal, nasional maupun mancanegara. Kota Bukittinggi merupakan suatu daerah yang beriklim sejuk dikelilingi oleh gunung-gunung dengan nagari-nagari tradisional serta tatanan kehidupan yang masih bertahan selama berabad-abad, Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi dengan mempunyai ciri khas masakan Padang yang terkenal sampai ke Mancanegara, sehingga setiap orang yang pernah berkunjung ke sumbar selalu terkesan dan tidak mudah melupakan keindahannya.
- d) Sebagai dampak lingkungan terhadap pengelolaan Sumber daya alam yang tidak dikelola secara profesional dan provosionl menyebabkan terjadinya bebarapa pelanggaran hukum seperti illegal meaning, illegal logging, illegal phising/pencurian ikan dapat berdampak negatif, disamping rusaknya ekosistem yang ada disekitar lokasi, terjadinya hutan gundul yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir/tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat maupun kerugian negara.
- e) Kekayaan alam khususnya kelautan memiliki potensi ikan sebagai penghasil Devisa negara namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kurang handal sehingga potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- f) Luas hutan di wilayah Sumatera Barat menunjukkan semakin terjadinya penurunan setiap tahunnya akibat adanya alih fungsi baik secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan adanya pemekaran wilayah dengan perubahan RT/RW atau dengan secara illegal yang dilakukan masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan dari data tahun 2019 hutan yang ada di wilayah Propinsi Sumatera Barat sebagai berikut:
- 1) Hutan lindung seluas : 923.246 Ha.
 - 2) Hutan Suaka alam dan wisata : 773.434 Ha.
 - 3) Hutan Produksi terbatas : 216.233 Ha
 - 4) Hutan Produktip tetap seluas : 429.281 Ha

4) **Ideologi.**

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia, Kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat.
- b) Pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan menghidupkan kembali paham ideologi komunis, di Sumbar sejak tahun 2012 (di Kota Padang, Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Padang Panjang) telah menemukan organisasi /kelompok / aktivis yang tergabung dalam YPKP (Yayasan Penelitian Korban Peristiwa) 1965 / 1966 dan pada tahun 2015 pada saat DPP YPKP Sdr. Bejo Untung akan melakukan pelantikan salah satu ketua DPC YPKP Kota Bukittinggi di Bukittinggi mendapat protes keras dari masyarakat Kota Bukittinggi sehingga rencana pelantikan PDC YPKP Bukittinggi batal dilaksanakan karena di protes oleh masyarakat sekitar.

5) **Politik**

- a) Kondisi Politik secara Nasional masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat kasus korupsi dan tidak ada keteladanan serta eforia yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat dilerlanggar.
- b) Munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem politik dan kehidupan partai politik sekarang ini mereka berobsesi mencitakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar rumput mengagregasi kepentingan rakyat yang paling riil yang mudah diartikulasikan menjadi isu politik dengan arah gerakannya adalah sebagai berikut :

1) Mendelegitimasi.....

- 1) Mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui isu korupsi.
 - 2) Memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra parlementer.
 - 3) Memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan calon independen ataupun partai politik lokal.
- c) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting yang berlaku dari pusat sampai ke tingkat daerah.
- d) Struktur Politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan masyarakat antara lain:
- 1) Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/ccontoh teladan bagi masyarakat luas.
 - 2) Pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan pada instansi /lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadi pelanggaran hukum / korupsi hampir di semua instansi pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
 - 3) Perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah disamping Sistem Multi partai saat ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak menganut sistem oposisi yang mengontrol dan mengkritisi kebijaksanaan pemerintah.
 - 4) Proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di kursi pemerintah , musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak terimplementasi secara konsisten ini terlihat dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model Voting.

- e) Budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunistis, nepotisme feodal dan anarkis indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan destruktif.
- f) Budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada konteks pemilihan kepemimpinan etika politik belum sepenuhnya mempedomani prinsip-prinsip demokrasi hal ini terlihat banyaknya pemaksaan kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai.
- g) Kebebasan Pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, Media massa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan dengan resiko sosial politik.
- h) Sistem hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai secara tuntas, Perumusan perundang-undang belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat dari pada kepentingan nasional.
- i) Penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum faktor lain yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- j) Jumlah Nagari di Wilayah Sumbar tahun 2022 sebanyak 1.228 nagari yang merupakan Pemerintah terendah dibawah Kecamatan ternyata belum mempunyai batas wilayah secara hukum akan tetapi batas ditentukan menurut hukum adat setempat sehingga hal ini merupakan kerawanan dimasa yang akan datang yakni terjadinya permasalahan konflik sosial berupa kasus keagrariaan /pertanahan, batas wilayah, pertambangan dan masalah perkebunan.

k) Partisipasi.....

- k) Partisipasi masyarakat untuk memilih calon Legislatif mulai dari DPRD Kab/Kota, Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sangat tinggi, karena pelaksanaannya di lakukan serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dari pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden tahun 2014 yang mencapai 71 %, sementara pada pelaksanaan Pilpres tahun 2019 di Sumbar mencapai 79,6 %. Namun pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur terjadi penurunan partisipasi masyarakat yaitu dengan menjadi hanya 65,42 %.
- l) Suhu Politik secara Nasional pasca dilaksanakan pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 relatif aman dan kondusif serta situasi Politik pasca pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Sumbar pada umumnya dalam keadaan relatif aman walaupun terjadi gejolak politik secara nasional namun di Sumbar masih tetap bisa terkendali serta menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 situasi saat ini telah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, diantaranya munculnya partai - partai baru untuk menjadi peserta konstetasi politik di tahun 2024, munculnya serta pergerakan dari beberapa Tokoh Nasional / Pejabat yang di gadang-gadang menjadipasangan presiden 2024.
- m) Isu-isu kebijakan pemerintah yang kontroversi serta problematika lama yang belum tuntas di masyarakat yaitu transparansi RUU KHUP, RUU Omnibuslaw, Pembangunan IKN.
- n) Suhu Politik wilayah Propinsi Sumatera Barat tahun 2024 diperkirakan akan menegang menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, dikarenakan dengan telah dimulainya rangkaian tahapan pileg, Pilpres, dan pemilihan kepala Daerah tahun 2024.
- o) Jadwal Pemilu Serentak tahun 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

p) Telah.....

- p) Telah berlangsung beberapa rangkaian tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yaitu saat ini sedang berlangsung tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu 2024 diantaranya :
- 1) Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 - 2) Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 - 3) Nomor Urut 3 PDI Perjuangan
 - 4) Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)
 - 5) Nomor Urut 5 Partai NasDem
 - 6) Nomor Urut 6 Partai Buruh
 - 7) Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
 - 8) Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 - 9) Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
 - 10) Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 - 11) Nomor Urut 11 Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
 - 12) Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
 - 13) Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang (PBB)
 - 14) Nomor Urut 14 Partai Demokrat
 - 15) Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
 - 16) Nomor Urut 16 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
 - 17) Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 18) Nomor Urut 24 Partai Ummat

6) Ekonomi

- a) Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik, terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri dimana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain, *debt to GDP* ratio sekitar 42%,. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%, transaksi berjalan 0,5%,”
- b) Neraca Perdagangan Indonesia selama 26 bulan terakhir terus mencatatkan nilai yang positif bahkan surplus. Indonesia juga masih mempunyai cadangan devisa sebesar US\$135 miliar. Situasi domestik relatif baik. Beberapa negara sudah masuk resesi, namun potensi resesi di Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 3%.

c) Stabilitas

- c) Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama ditopang dengan meredanya atau makin baiknya penanganan Covid-19 dan diikuti oleh pelanggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian makin mendorong kegiatan perekonomian di dalam negeri.
- d) Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat/rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Kinerja ekspor yang dalam hal ini mengalami peningkatan sangat signifikan namun tetap harus diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat terjadinya perang di Ukraina.
- e) Sejumlah indikator ekonomi masih tercatat baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, *index growth* dari kendaraan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan meningkat mencapai USD3,83 Miliar. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kenaikan surplus neraca perdagangan non migas terutama dengan meningkatnya harga-harga komoditas global seperti batu bara, besi, baja serta CPO.
- f) Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 mencapai USD 139,1 Miliar atau setara pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri Pemerintah. Cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
- g) Di sisi nilai tukar, nilai tukar Rupiah Indonesia pada triwulan I 2022 tetap terjaga dan hanya mengalami sedikit depresiasi sebesar 0,33% secara rata-rata dibandingkan posisi akhir tahun 2021. Depresiasi rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia, India, dan Thailand.
- h) Inflasi hingga Maret 2022 juga tetap terkendali pada tingkat 2,64% *year on year*. Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran di dalam merespon kenaikan permintaan, dan juga tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respon kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur oleh pemerintah.

i) Meskipun

- i) Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, cost of fund, dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu KSSK tetap mewaspadaikan dan memantau stabilitas sistem keuangan, untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
- j) Krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro sebagai persyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan , mengingat masih tingginya resiko ketidak pastian perekonomian dunia dan munculnya hambatan - hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan sehingga strategis tersebut sebagai perwujudan clean goverment dan good governance belum sepenuhnya berhasil ,sebagai Indikator stabilitas ekonomi makro antara lain :
- 1) Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen, dimana pemerintah akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan.
 - 2) Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal dapat lebih diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.
 - 3) Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak disekitar Rp14.750 per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN)10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

4) Harga

- 4) Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.
 - 5) Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Sementara neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat, berperan menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri sejak 2015. Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global.
 - 6) Pada sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022. Pada Juli 2022, Indikator *Purchasing Managers' Index (PMI)* meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat.
- k) Dalam rangka menjaga menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, suku bunga nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang baik , sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga.
- l) Potensi sumber Daya Energi dan mineral pada tahun 2024 secara nasional diperkirakan akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya energi dan mineral yang semakin berkurang seiring tingginya permintaan pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sangat terbatas dan sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan sebagai sulusnya pada tahun 2023 penggunaan mobil Listrik akan terealisasi walaupun masih dalam tahap pengembangan.
- m) Isu.....

- m) Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan seperti Isu tumpang tindih lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar.
- n) Kebijakan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dipenuhi oleh merk asing, munculnya mobil murah dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk membayar royalti atas lisensi, disamping sebagian besar industri di Indonesia bermasalah terkait dengan pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan berdampak sosial yang luas.
- o) Kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala antara lain Meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu sendiri karena kalah kompetisi / keahlian.
- p) Perdagangan Bebas ASEAN dan CHINA / Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak, elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil produk dalam negeri.
- q) Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Sumbar saat ini mengalami kenaikan yang fantastis (Jumlah tahun 2022 jumlah : R.2 sebanyak dan R4/6 2.536.336 unit yang mana mengalami kenaikan rata-rata setiap tahunnya sekitar 0.6 %. sedangkan penambahan jalan setiap tahunnya relatif stagnan / tidak ada penambahan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan naiknya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap tahun khususnya kota - kota besar di Sumbar.

r) Kebijakan

- r) Kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap tahunnya serta akan dihapuskannya subsidi bagi konsumen yang berlangganan 450 s/d 900 KWH terkait dengan makin menipisnya cadangan BBM di dalam negeri serta makin sulitnya bahan alternatif seperti batu bara di Indonesia sebagai bahan dasar pembangkit listrik hal ini diprediksi akan menimbulkan keresahan dan memicu aksi protes /unjuk rasa karena dinilai hal tersebut semakin memberatkan beban hidup masyarakat, selain itu kenaikan tersebut juga akan menambah beban pengusaha pasca kenaikan upah minimum Propinsi yang selalu dituntut oleh para buruh, sehingga dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena pengusaha tidak sanggup lagi menjalankan usahanya/bangkrut.
- s) Pembangunan disektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian subur yang tergusur oleh perumahan dan idustrialisasi yang belum diimbangi dengan pengembangan lahan pertanian baru serta upaya modernisasi pertanian belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat petani dan ada kecenderungan petani masih senang dengan sistem tradisional.
- t) Potensi terjadinya illegal logging di Sumbar sangat besar yang berdampak dapat merugikan kekayaan negara, terjadi pengrusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir yang merugikan masyarakat etap akan terjadi setiap tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijaksanaan otonomi daerah yang memberikan porsi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam di daerahnya disalah artikan sebagai kebebasan untuk dapat dimanfaatkan sumber daya alam hutan tanpa memperhatikan peraturan perundang- undangan serta kurangnya rasa tanggung jawab pejabat berwenang pada proses perijinan dalam pemanfaatan sumber daya hutan serta kurangnya pengawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan.
- u) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Sumatera Barat belum dimanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan karena kurangnya modal, kurang iptek yang handal, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih jauh dari memadai sehingga para nelayan belum dapat maksimal untuk memanfaatkan potensi laut yang ada.

v) Keterbatasan

- v) Keterbatasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri telah berdampak terhadap animo untuk mencari pekerjaan ke luar negeri secara legal maupun illegal, sehingga tidak sering terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul khususnya pekerja yang bekerja di luar negeri, sedangkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri belum terimplikasi secara baik/optimal.
- w) Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dunia, tidak terkecuali di Sumbar, yang mana pertumbuhan ekonomi di Sumbar tumbuh 4,54 persen pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan triwulan III 2021. Hal tersebut didorong oleh aktivitas pariwisata dan permintaan jasa angkutan terutama udara yang naik signifikan lebih dari 200 persen dibandingkan triwulan III 2021.

7) Sosial Budaya

- a) Pembangunan kehidupan umat beragama di sumbar telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing- masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang dinilai sesat dan menyesatkan seperti yang pernah terkjadi di Sumbar antara lain:
 - 1. Ajaran islam Jamaah/LDII.
 - 2. Ajaran islam Darul Arqam.
 - 3. Ajaran Ahmadiyah.
 - 4. Ajaran Agama Bahai, aliran sesat sempalan Syiah.
 - 5. Aliran pelindung kehidupan
 - 6. Tauhid Ibrahim
 - 7. BAB Kesucian

b) Kemajemukan.....

- b) Kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing untuk berkunjung di sumbar, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik merupakan potensi timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah” yang artinya adat ditopang oleh Sara’ (Agama) dan agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya pendatang - pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal.
- c) Transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan tata laku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas, penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan untuk menangkal danmenyaringpengaruh budaya asing.
- d) Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa saat ini antara lain: Individualistis, Materialistis, konsumtif, perilaku anarkis destruktif, merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.
- e) Organisasi masyarakat/LSM, UU keormas sebagai salah satu landasan hak-hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat , apabila pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain : persaingan antar ormas yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar organisasi.

f) Pelanggaran.....

- f) Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan anak belum terealisasi dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti Eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta kekerasan berupa seksual, fisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.
- g) Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan terjadinya pemanasan global).
- h) Kasus pertanahan di sumbar pada awalnya hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif.
- i) Ketenagakerjaan, Aksi unjuk rasa elemen buruh dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan dengan meminta kenaikan UMP/UMR diprediksi akan terus berlanjut setiap tahunnya sejalan dengan makin tingginya kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat sehingga gaji buruh tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari- hari .
- j) Peraturan Menteri Agama RI dan Mendagri No. 08 dan nomor 09 tahun 2006 Bab.IV pasal 13 dan 14 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak memiliki izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat antara yang pro maupun yang kontra, sehingga berakibat rentan terjadinya konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan kamtibmas.

k) Potensi.....

- k) Potensi terjadinya kasus sengketa tanah di Sumatera Barat cukup tinggi dimana penyelesaiannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, terjadinya pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.
- l) Adanya organisasi/kelompok garis keras yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kegiatannya senantiasa sering berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang perlu diwaspadai walaupun beberapa organisasi tersebut sudah di bubarkan oleh Pemerintah di antara FPI namun organisasi – organisasi lain yang harus di waspadai Antara lain:
- Organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
 - Organisasi HTI (Hizburt Tahir Indonesia).
 - Organisasi KPSI (Komite Penegak Sariah Islam).
 - Organisasi FMPI (Forum Musyawarah Pembela Islam)
 - Organisasi GMM (Gerakan Muslim Minang).
 - Organisasi FMM (Forum Masyarakat Minang Kabau).
 - Organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)
 - Presidium Alumni (PA) 212
- m) Maraknya akhir - akhir ini pemberitaan tentang pembentukan negara Khilafah di Indonesia dimana Khilafah Islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Mengemukanya kembali tuntutan umat Islam atas pelaksanaan dan pengelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kalangan nasionalis sekuler. Dalam perkembangannya konsep pembentukan negara khilafah islamiyah bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia yang mendasarkan pancasila sebagai dasar negara bukan agama yang menjadi dasar negara. Di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang mempunyai basis Khilafatul Muslimin maupun Negara Islam Indonesia diantaranya Kota Padang, Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, Lima Puluh Kota.

8) Keamanan.

Permasalahan di bidang keamanan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan tahun 2024 meliputi:

- a) Tingkat kesadaran kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dalam menangani masalah keamanan dimana masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.
- c) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal.
- d) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
- e) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.
- f) Adanya keterlibatan masyarakat sumbar dalam jaringan teroris Nasional baik berafiliasi dengan ISIS, Jamaah Islamiyah (JI) maupun Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang telah dilakukan penangkapan terhadap terduga terorisme oleh Densus 88 AT dan kemungkinan dalam pengembangannya masih adanya jaringan-jaringan terorisme lainnya yang belum tertangkap yang dapat menjadi ancaman baik berupa terror maupun tindak kejahatan lainnya di Wilkum Polda Sumbar.

Kerawanan daerah yang perlu mendapat perhatian.

Kerawanan daerah berdasarkan analisis jenis kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah Kab/Kota di Sumbar dan menjadi prioritas untuk mendapat perhatian tahun 2024 antara lain :

- a) Polresta Padang kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Pembakaran/kebakaran, Narkoba, judi, tetorisme, Korupsi, Unjuk Rasa, dan Perkelahian antar Pelajar/tawuran, banjir/tanah longsor, gempa bumi / tsunami, angin puting beliung, pelanggaran OA dan Laka Lantas.
- b) Polres Padang Pariaman kerawanannya adalah : Curat, Curas, curanmor, judi, pencurian ikan, Perkosaan, Pembunuhan, Pengrusakan, Narkoba, Unjuk Rasa , terorisme, penyelundupan, perkelahian, ilegal loging gempa bumi/tsunami, banjir, longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- c) Polres Pessel Kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, penipuan, pembakaran, judi, narkoba, Illegal loging, penyelundupan, Illegal Fishing, konflik lahan/perkebunan, gempa bumi dan tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan laka lantas.
- d) Polres Bukittinggi kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Narkoba, Unjuk Rasa, teror, Perkelahian antara Pelajar, Korupsi, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung dan Laka Lantas.
- e) Polres Payakumbuh kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Narkoba, Perjudian, Anirat, cabul, Unjuk rasa, penyelundupan, Teror, OA, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lantas
- f) Polres Pasaman Barat kerawanannya adalah : Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Loging, illegal Minning, Gempa bumi/tsunami, Konflik Sosial dan konflik Perkebunan, intoleransi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.
- g) Polres Solok kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, Rusuh massal / antar nagari, Unjuk Rasa, Korupsi, Illegal Mining, Konflik Konflik lahan / perkebunan, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lantas.

h) Polres.....

- h) Polres Dharmasraya kerawanannya adalah : Curat, curas, curanmor, penipuan, kebakaran/pembakaran, Illegal logging, illegal mining, perkelaian antara kampung, perkelahian antar suku, senpi/handak, Rusuh Massal, Narkoba , teror, Konflik lahan / perkebunan, intoleransi, tanah longsor, karhutla dan laka lant.
- i) Polres Solok Kota kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Unjuk rasa, kebakaran, perkosaan /pencabulan, kebakaran/pembakaran perkelahian antar kampung, narkoba, gempa bumi, banjir, tanah longsor, karhutla dan laka lant.
- j) Polres Pariaman kerawanannya adalah : Curat, curas, curanmor, pengrusakan, penipuan, kebakaran, perjudian, Narkotika, korupsi, pencurian ikan, gempa/tsunami, banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lant.
- k) Polres 50 Kota kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Perkosaan, Cabul, penipuan, Narkoba, Korupsi perkelahin antar Nagari, Unjuk Rasa, banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, karhutla dan Laka Lant.
- l) Polres Solok Selatan kerawanannya : Illegal loging, Curas, Curat, Curanmor, pengrusakan, penipuan, perkelahian, kebakaran / pembakaran, senpi / handak, illegal logging, illegal minning, Rusuh massal, Konflik Lahan/Perkebunan, tanah longsor, karhutla dan laka lant.
- m) Polres Tanah Datar kerawanannya adalah : Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Masal / antar nagari, Korupsi, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung, karhutla dan Laka Lant.
- n) Polres Padang Panjang kerawanannya adalah : Curat, curas, curanmor, anirat, kebakaran/pembakaran, Narkoba, perkelahian antar pelajar, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, angin puting beliung dan laka lant.
- o) Polres Agam kerawanannya adalah : Curat, Curas, Pembunuhan, Perkosaan, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Massa/Antar Nagari, Konflik Lahan/Perkebunan, Gempa bumi, gunung meletus, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, karhutla dan Laka Lant.
- p) Polres Pasaman kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Loging, Gempa Bumi, banjir, Tanah Longsor, karhutla dan Laka Lant.

q) Polres.....

- q) Polres Sawahlunto kerawanannya adalah: Curat, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran, Narkoba, Illegal Logging, Peti, tanah longsor, karhutla dan Laka Lantas.
- r) Polres Sijunjung kerawanannya: Illegal Logging, Illegal minning, curat, Curas, curanmor, Kebakaran, Narkoba, banjir, tanah longsor, Unjuk Rasa, Rusuh Massal, konflik Lahan/Perkebunan, intoleransi, karhutla dan laka lintas.
- s) Polres Mentawai kerawanannya adalah: Illegal Logging, penyelundupan, pencurian ikan, perkelahian, terorisme, pelanggaran OA, banjir/abrasi, gempa bumi, tsunami dan karhutla.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar tahun 2022 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori BB dengan nilai (72,75). Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan kejahatan, Curat, Curas, Curanmor, Penipuan, Narkoba dan Kriminal lainnya yang menuntut Polri untuk lebih optimal dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi pada Tahun 2024 dan khususnya pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a. Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang auditing;
- b. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- c. Masih adanya para pengguna anggaran/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan anggaran (RPD) masing-masing Satker dan Satwil Polda Sumbar sehingga berdampak terhadap program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang menjadi belum optimal;
- d. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

- a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Visi Polda Sumatera Barat
"Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib".
 - 2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
"Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan, Audit, Reviu dan Klarifikasi secara professional".

b. Misi

b. Misi Polri dan misi Polda Sumatera Barat

1) Misi Polda Sumatera Barat

Dengan mempedomani arah kedepan sesuai visi Polri, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

- a) **Melindungi** keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;
- b) **Melayani** kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- c) **Mengayomi** dengan selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat Sumatera Barat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut:

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;

d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan reuiu untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan melaksanakan evaluasi untuk tersedianya informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai;
- e. Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

2. Tujuan jangka menengah

a. Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Barat; Menegakkan hukum secara berkeadilan;
 - 2) Mewujudkan Polri Polda Sumbar yang Profesional;
 - 3) Modernisasi pelayanan Polri Polda Sumbar;
- Menerapkan manajemen Polri Polda Sumbar yang terintegrasi.

b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1. Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional;
- 2. Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
- 3. Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
- 4. Terselenggaranya kegiatan reuiu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;

5. Terselenggaranya

5. Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Sasaran Prioritas Tahun 2024

- a. Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat tahun 2024
 - 1) Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat;
 - 2) Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik Polri;
 - 3) Penegakan Hukum yang Transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan Publik;
 - 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
 - 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
 - 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan Tatakelola Organisasi yang baik.
- b. Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2024
 - 1) Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional;
 - 2) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - 3) Setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan;
 - 4) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini;
 - 5) Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti.

III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2024

1. Arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumatera Barat Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat”** yaitu:

1) penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/ PPK/ prog 5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- b) melakukan Lidikpangal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/ PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130,131);
- c) mengembangkan manajemen operasi intelkam Polda Sumbar; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog BQ/SP1/SS1/ IKU1/ PPK/prog 5, 10, giat 16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
- d) melaksanakan penelitian dan survei dalam rangka mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polri. (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 4, giat 11, renaksi 41, 42, 43);

2) meningkatkan

- 2) meningkatkan pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan/nagari; (giat5076/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
- b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang memiliki paham radikal; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
- d) menetralsir dan menekan isu berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas serta membentuk jaringan media informasi; (giat 3149, 3070/prog WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 13, giat 43, renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);
- e) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; (giat 3155/prog WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat12, 13, 16, renaksi 44, 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);
- f) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas; (giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
- g) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan; (giat 5081/ prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);
- h) meningkatkan

- h) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata; (giat 3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 50);
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan *pemolisian prediktif* serta dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (Giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- b) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46, 47);
- d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; (giat 3133,4343/prog BQ,BI/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);
- 4) penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65, 68);
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55, 67);

5) meningkatkan

- 5) meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat jam rawan serta berperan aktif dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas;
(giat 3133/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 49);
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27 ,28, renaksi 49, 107, 112);
- c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta peran aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat 3131/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);

- 6) meningkatkan peran aktif Polri di wilayah rawan gempa dan bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah; (giat 5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5,giat 19, 20, renaksi 74, 78);
- b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan satwa;
(giat 3130,5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);

c) memetakan

- c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana; (giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan pandemi, gempa dan bencana; (giat 3072, 5076/prog BQ, WA /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31);
- 7) terlaksananya pengamanan event nasional/ internasional tahun 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat event nasional/ internasional berlangsung; (giat 5080,5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
 - b) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/internasional tahun 2024; (giat 3130, 3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 70, 71, 73, 126);
 - c) melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu 2024 ditahun 2023; (giat 3130,3131/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28,renaksi 49, 70, 107, 112);
- 8) penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergitas polisonal serta menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan

- a) melaksanakan dan mengoordinasikan kontinjensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat 5080, 5087/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
 - b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat 5087/prog BQ/SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 17, renaksi 69);
 - c) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif;
(giat 5076, 5087/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; (giat 3130/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 19, 20, renaksi 74, 78, 101, 103);
 - e) tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek tertentu;
(giat 3131 /prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);
 - f) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan;
(giat 5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, 30, renaksi 50, 120);
 - g) memperkuat Binmas Nokendengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas;
(giat 5076/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
- 9) peningkatan kerja sama dalam negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

melaksanakan

melaksanakan kerja sama antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional; (giat 3120/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 20, renaksi 78, 104, 105, 110, 111, 147, 148, 158);

- 10) penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum;

(giat 3134, 4342/ prog BQ, BI /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48);

- 11) penguatan Polri dibidang keamanan di pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi di pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan patroli (pre-emptif, preventif dan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN, baik darat maupun laut; (giat 3130, 5087, 3134/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, 10, giat 12, 10, renaksi 48, 50, 133);
- b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, Obvit/ Obvitnas dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan pulau berpenghuni; (giat 3130, 3131,/ prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48, 50);
- c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian dan rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni; (giat 5081/prog BQ /SP1/SS1/IKU1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);

b. Arah

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”, yaitu:

- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;

(giat 3133, 3084/prog BP, BQ, prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog 4, 11, giat 9, 10,37,40, renaksi 33,37,8,135,141,142,144);

- b) meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;

(giat 3133, 3084/prog BP, BQ,prog2/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40, renaksi 33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);

- c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi; (giat 3133/prog BQ /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 37, 38, renaksi 135, 136, 137, 139, 143);

- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan meniadakan pungutan liar di pelayanan publik, serta menumbuhkan sikap petugas yang melayani;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online;

(giat 3073/prog WA /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);

- b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajan; (giat 3072/prog WA /SP2/SS5/IKP12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);

c) mengoptimalkan

- c) mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS); (giat 5076/prog BQ/SP2/SS4/IKP4/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
 - d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan intelkam Polda Sumbar melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di Polda Sumbar dan jajaran Polres; (giat 3084/prog BP /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
- 3) keterpaduan dalam pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan tatakelola RPK yang humanis serta berbasis TIK;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat 5062/ prog BP /SP2/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 40);
- 4) mengoptimalkan quick response Kepolisian sesuai standar Operasional Prosedur (SOP):
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat 5081/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 9, giat 32, renaksi 123);
 - b) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat 3131/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 50, 107);
 - c) mengelola kegiatan respons time di Wilkum Polda Sumbar dan kewilayahan; (giat 3130/prog BQ/SP2/SS1/IKU1/PPK prog 5, 9, giat 12, 30, renaksi 48, 117);

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”**, yaitu:

1) meningkatkan profesionalisme dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Sumatera Barat;
(giat 4342/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- b) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba (TPPU), Karhutla/LH serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
(giat 3140, 3142, 3144, 3145, 3146, 5083, prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 85, 86, 87, 88, 94,95, 98, 106);
- c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat 3145/prog BI/SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 86, 109);
- d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (giat 3142/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
- e) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat; (giat 3151/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 88);
- f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; (giat 3130/prog BQ/SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 92, 93, 102);

g) mempercepat

- g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 89, 90, 108);
- 2) peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum guna memenuhi rasa keadilan masyarakat:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat 3137/ prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162, 163);
- c) mengoptimalkan Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) sebagai sarana pengawasan dan transparansi; (giat 5086/prog BI /SP3/SS2/IKU2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker; (giat 5052/prog WA /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);

b) pengembangan

- b) pengembangan struktur organisasi Polri pada tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (giat 5052/prog WA/SP4/SS3/IKP2/PPK prog 1, giat 1, 2, renaksi 2, 3, 4);
 - c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; (giat 5052/prog WA /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 2, giat 3, renaksi 6, 7);
 - d) menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18, 19);
 - e) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 5, renaksi 21, 27);
- 2) melaksanakan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward); (giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9, 10, 12);
- b) melaksanakan rencana Pendidikan Diktuba di SPN Polda Sumbar; (giat 3096, 3100, /prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, 5, renaksi 11, 17, 21, 22);
- c) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif; (giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11);

d) meningkatkan

- d) meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang Kamtibmas;
(giat 3100,5076 /prog BD, BQ /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3,giat 4, renaksi 16);
- 3) Perluasan kerja sama pendidikan di dalam negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan perintisan kerja sama pendidikan Dagri;
(giat 3100/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 6, renaksi 24, 77);
- b) melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri;
(giat 3100/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 6, renaksi 24, 25);
- c) menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) pada tingkat Polda; (giat 3107/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
- 4) peningkatan pelaksanaan tatakelola *e-government* melalui *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-procurement* untuk mendukung kesejahteraan anggota Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menggunakan Aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat3084,/prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);
- b) mengembangkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan informasi teknologi, baik hardware maupun software untuk mendukung aplikasi e-planning dan e-budgeting; (giat 3084/ prog BP /SP4/SS4/IKP4/PPK prog 4, giat 9, renaksi 33, 34);

c) melaksanakan

- c) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
(giat3100,/prog BD/SP4/SS3/IKP1/PPK prog3, giat 4, renaksi 13, 14);
- d) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri termasuk penanganan pasien Covid-19;
(giat 3072, 3100/prog BD, WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 11, 14);
- 5) pelaksanaan Sistem Manajemen karir berbasis kinerja serta berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”; (giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 23);
- b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
(giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 22);
- c) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP;
(giat 3108/prog BD /SP4/SS3/IKP2/PPK prog 3, giat 5, renaksi 18);
- d) memperbanyak jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus;
(giat 3100, 5076/prog BD, BQ /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13);
- 6) peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi aparaturnya Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan

- a) melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama; (giat 3072/prog WA /SP4/SS5/IKP12/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
 - b) melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas;
(giat 3072, 3105/prog WA, BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30, 32);
 - c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan Asabri; (giat 3105/prog BD /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
 - d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat 5062, 3072, 5052/prog BP, WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 30,31);
 - e) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat 5052, 3072/ prog WA /SP4/SS3/IKP1/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 39);
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”**, yaitu:
- 1) pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri;
(giat 5062/prog BP /SP5/SS4/IKP4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);

b) melanjutkan

- b) melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan. (giat 5062/prog BP /SP5/SS4/IKP4/PPK prog 4, 5, giat 10, 12, renaksi 38, 48);
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ***“Penguatan Pengawasan yang Efektif Guna Menguatkan Integritas dan Tatakelola Organisasi yang baik”***, yaitu:
- 1) penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 149, 167);
- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP13/PPK prog 15, giat 49, renaksi 171, 172, 174);
- 2) Penguatan Saber Pungli;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli; (giat 3091/prog WA/SP6/SS5/IKP14/PPK/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli;
(giat 3091/prog WA/SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 166, 170);
- c) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS;
(giat 5086/prog BI/SP6/SS1/IKU1/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- d) pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMA, SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; (giat 5086/prog BI /SP6/SS1/IKU1/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
- e) pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK); (giat 5086/prog BI /SP6/SS1/IKU1/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
- f) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri; (giat 3091/ prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 169);

3) Pencegahan Korupsi di internal Polri:

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 49, renaksi 170, 173);
- b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);

c) sosialisasi

- c) sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP14/PPK prog 14, giat 47, renaksi 165);
- 4) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menginput data ke aplikasi terkait perencanaan dan penganggaran Polri;
(giat 5054 /prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 4, giat 10, renaksi 38, 140);
- b) meningkatkan sinergisitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Sumbar (Rancangan Renja dan Renja Polda, Satker dan Satwil) guna mensinkronkan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas;
(giat 5051/prog WA /SP6/SS5/IKP7/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168);
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 163);

e) melaksanakan

- e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran baik di bidang pembinaan dan operasional; (giat 3091/prog WA /SP6/SS5/IKP11/PPK prog 14, giat 47, renaksi 162);
- 5) Penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan); (giat 5052/prog WA /SP6/SS5/IKP10,12/PPK prog 1, giat 1, renaksi 1, 2);
- b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya; (giat 5052/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 1, giat 1, renaksi 3);
- c) melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Polda; (giat 5052/prog WA /SP4/SS5/IKP10/PPK prog 1, giat 2, renaksi 4,5);
- 6) Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dalam rangka *good governance clean government*; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai

tuntutan

- tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- b) melanjutkan pelaksanaan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/ Polresta, agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 138, renaksi 140);
- c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik; (giat 5053/ prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
- d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 11, giat 39, renaksi 140);
- e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda; (giat 5053/prog WA /SP6/SS5/IKP10/PPK prog 12, giat 41, renaksi 146).

2. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2024, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Menjadikan personel APiP yang berkualitas dan professional”, yaitu:

1) Melaksanakan

- 1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya Bimtek (Prog WA, giat 3073)

- 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan personel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan perosnel; (Prog WA, giat 3073)

- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efesien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi”, yaitu:

- 1) melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

a) Terselenggaranya Audit Kinerja

b) Terselenggaranya Audit dengan tujuan tertentu

- 2) Pemeliharaan kantor/pemeliharaan peralatan dan mesin.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan (Prog BP, giat 5059).

c. Arah

- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan”, yaitu:

melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya Verifikasi (Prog WA, giat 3091);

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini”, yaitu:

melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya reviu dan evaluasi (Prog WA, giat 3073);

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti”, yaitu:

Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Prog WA, giat 3091, PPP Giat 1)

IV. Program, kegiatan dan Pagu Ideal T.A. 2024

1. Program dan Kegiatan

a. **Program BP** modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri khususnya pada Itwasda Polda Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

a) Dukungan manajemen dan teknis sarpras.

b. **Program WA** dukungan manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sector.

2) Kegiatan:

a) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;

b) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.

2. Pagu Ideal Itwasda Polda Sumbar T.A. 2024.

Alokasi pagu Ideal Itwasda Polda Sumbar TA. 2024 sebesar Rp. **5.035.567.000,-** (lima milyar tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Program

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 109.162.000,- (seratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Program dukungan manajemen Rp. 4.926.405.000,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima ribu rupiah).

V. PENUTUP

Demikian Rancangan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2024

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 9 Januari 2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Lampiran

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ //REN.2.3./2023 TANGGAL JANUARI 2023

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

RKT

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ //REN.2.3./2023 TANGGAL JANUARI 2023**

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
 INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
 ITWASDA POLDA SUMBAR TA 2024

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
SS1	Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar	IKU1	Indeks Profesionalitas SDM Itwasda Polda Sumbar	48	
		IKP2	Terselenggaranya diklat profesi oleh BPKP	14	
		IKP3	Terselenggaranya Bimtek	1	
SS2	Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar	IKP4	Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Almatsus Itwasda Polda Sumbar	62%	
SS3	Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani	IKP5	Nilai SAKIP	73,00	
		IKP6	Nilai Kinerja Anggaran	93,20	
		IKP7	Terselenggaranya Audit Kinerja	2	
		IKP8	Terselenggaranya Audit Tujuan Tertentu	17	
		IKP9	Terselenggaranya Verifikasi	27	
		IKP10	Terselenggaranya Reviu dan Evaluasi	5	
		IKU11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100%	

Ditetapkan di : Padang
 pada tanggal : 9 Januari 2023

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



Arif Rahman Hakim

ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RANCANGAN RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

RKA-KL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ //REN.2.3./2023 TANGGAL JANUARI 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BP 5059 5059.EBA	Program Modernisasi Almsatus dan Sarana Prasarana Polri Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		109,162,000 109,162,000 109,162,000	
5059.EBA.994 002 AY	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10	1.0 Layanan		109,162,000 86,800,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 4	7.0 UNIT	12,400,000	86,800,000	RM
BB	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2			9,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 2	4.0 UNIT	2,250,000	9,000,000	RM
BH	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR			13,362,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Pemeliharaan Personel Komputer - Pemeliharaan Printer - Mesin Foto Copy	6.0 UNIT 15.0 UNIT 1.0 UNIT	730,000 463,000 2,037,000	4,380,000 6,945,000 2,037,000	RM
060.01.WA 3073 3073.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,926,405,000 3,917,300,000 3,917,300,000	
3073.EBA.962 003 AD	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Umum Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI	1.0 Layanan		466,022,000 466,022,000 343,351,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) - Snack/Kudapan Rakernis Fungsi Pengawasan [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI - Makan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI - Snack/Kudapan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI - Makan Rapat Klarifikasi Penanganan Dumas [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI - Snack/Kudapan Rapat Klarifikasi Penanganan Dumas [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI - Dukungan Kegiatan (PENINGKATAN KAPABILITAS APIP)	135.0 OK 108.0 OK 108.0 OK 165.0 OK 165.0 OK 2.0 Giat	17,000 25,000 17,000 25,000 17,000 100,815,000	2,295,000 2,700,000 1,836,000 4,125,000 2,805,000 201,630,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang) Penginapan (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [2 ORG x 2 GIAT x 1 MALAM] - Uang Harian (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [2 ORG x 2 GIAT x 2 HARI] Biaya Transportasi JALDIS KE JAKARTA DALAM RANGKA GIAT - RAKERNAS/RAKORWAS/DIKLAT/PELATIHAN [4 ORG x 5 GIAT] Uang Harian (JALDIS KE JAKARTA DALAM RANGKA GIAT RAKERNAS/RAKORWAS/DIKLAT/PELATIHAN) [4 ORG x 5 GIAT x 3 HARI]			127,960,000	RM
AG	<u>SOSIALISASI</u>			1,360,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) - Snack/Kudapan Sosialisasi DIPA RKA-K/L [40 ORG x 1 GIAT x 2 KALI]	80.0 OK	17,000	1,360,000	RM
BU	<u>EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN</u>			48,095,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) - Snack/Kudapan Reviu LKIP Polda [8 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI] - KERTAS A4 (REVIU LKIP POLDA) [6 RIM x 1 KALI] - TINTA (REVIU LKIP POLDA) [2 BTL x 1 KALI] - Spanduk (EVALUASI/PENILAIAN SAKIP) [1 BUAH x 1 GIAT] - Snack/Kudapan Evaluasi/Penilaian SAKIP [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI] - Snack/Kudapan Evaluasi ZI [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI] - Snack/Kudapan Reviu/Revisi RKA-K/L [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI] - DUK GIAT REVIU LAPKEU [1 GIAT] - Snack/Kudapan Reviu Laporan Keuangan [145 ORG x 2 GIAT x 3 HARI x 1 KALI]	16.0 OK 6.0 RIM 2.0 BTL 1.0 LMBR 114.0 OK 135.0 OK 114.0 OK 1.0 GIAT 870.0 OK	17,000 52,000 80,000 300,000 17,000 17,000 17,000 1,814,000 17,000	272,000 312,000 160,000 300,000 1,938,000 2,295,000 1,938,000 1,814,000 14,790,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang) Penginapan (EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI) [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 1 MALAM] Uangan harian (EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI) [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 2 HARI]	28.0 OH 56.0 OH	367,000 250,000	10,276,000 14,000,000	RM
DX	<u>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER</u>			9,236,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) - Snack/Kudapan Bintek LHKPN [132 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI] - Spanduk (BINTEK FUNGSI PENGAWASAN) - Snack/Kudapan Bintek Fungsi Pengawasan [76 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	132.0 OG 1.0 LMBR 76.0 OK	17,000 300,000 17,000	2,244,000 300,000 1,292,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.010-Padang) - Biaya narasumber/pemapar [6 ORG x 1 GIAT x 1 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	RM
E	<u>PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN RENCANA KERJA</u>			782,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			782,000	RM
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [4 RIM x 1 KALI]	4.0 RIM	52,000	208,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 BTL x 1 KALI]	2.0 BTL	80,000	160,000	
	- JILID (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [10 BUKU x 1 KALI]	10.0 BTL	30,000	300,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 PACK x 1 KALI]	2.0 PACK	57,000	114,000	
F	<i>PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA</i>			2,016,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			2,016,000	RM
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [4 RIM x 4 KALI]	16.0 RIM	52,000	832,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 BTL x 4 KALI]	8.0 BTL	80,000	640,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [1 PACK x 4 KALI]	4.0 PACK	57,000	228,000	
	- PULPEN (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 KOTAK x 4 KALI]	8.0 KOTAK	23,000	184,000	
	- MATERAI (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [11 BUAH]	11.0 BH	12,000	132,000	
FS	<i>DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER</i>			26,340,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			26,340,000	RM
	- DUK GIAT (TAKLIMAT AWAL DAN AKHIR AUDIT KINERJA) [6 GIAT]	6.0 GIAT	3,200,000	19,200,000	
	- Snack/Kudapan Taklimat Awal dan Akhir Audit Kinerja [70 ORG x 6 GIAT x 1 HARI]	420.0 OG	17,000	7,140,000	
G	<i>PENYUSUNAN EVALUASI LKIP</i>			826,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			826,000	RM
	- Snack/Kudapan Penyusunan Evaluasi LKIP Polda [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI]	10.0 OK	17,000	170,000	
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	
JZ	<i>HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN</i>			33,360,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			33,360,000	RM
	- Honor Operator SIRENA dan E-monev [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,800,000	21,600,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
TV	<i>PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA</i>			656,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			656,000	RM
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID (PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024) [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3073.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		3,451,278,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,391,258,000	U
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			<i>3,391,258,000</i>	
511161	<u>Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			258,515,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	217,923,000	217,923,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
511169	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			6,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511171	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			12,935,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	11,087,000	11,087,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	924,000	924,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	924,000	924,000	
511172	<u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			7,540,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	6,458,000	6,458,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	541,000	541,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	541,000	541,000	
511173	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			35,700,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1.0 THN	30,600,000	30,600,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
511175	<u>Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,105,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,779,000	1,779,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	163,000	163,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	163,000	163,000	
511176	<u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			9,225,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	9,225,000	9,225,000	
511179	<u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			71,749,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	71,749,000	71,749,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511193	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	2,160,000	2,160,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	180,000	180,000	
511211	<u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			1,711,357,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,463,551,000	1,463,551,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
511219	<u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			19,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	15,000	15,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			105,872,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	90,746,000	90,746,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
511222	<u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			34,559,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	29,621,000	29,621,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
511223	<u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			236,810,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	202,980,000	202,980,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			25,373,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	1.0 THN	21,747,000	21,747,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
511226	<u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			109,583,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI	1.0 THN	109,583,000	109,583,000	
511228	<u>Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			669,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	669,600,000	669,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511232	<u>Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			5,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	1.0 THN	4,800,000	4,800,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	400,000	400,000	
511244	<u>Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			13,650,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	11,700,000	11,700,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	975,000	975,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	975,000	975,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.010-Padang)			78,540,000	RM
	- Golongan II (UANG LEMBUR) [2 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	528.0 OJ	17,000	8,976,000	
	- Golongan III (UANG LEMBUR) [5 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	1320.0 OJ	20,000	26,400,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN LEMBUR) [2 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	264.0 OH	35,000	9,240,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN LEMBUR) [5 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	660.0 OH	37,000	24,420,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN LEMBUR POLRI) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	35,000	4,620,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN LEMBUR POLRI) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	37,000	4,884,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			60,020,000	
<i>BW</i>	<i>PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</i>			<i>60,020,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.010-Padang)			60,020,000	RM
	- Bekal kantor	40.0 OT	1,500,500	60,020,000	
3091	<u>Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan</u>			1,009,105,000	
3091.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	79.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,009,105,000	
3091.EBD.965	Lokasi : KOTA PADANG <u>Layanan Audit Internal</u>	79.0 Dokumen		1,009,105,000	
003	<u>Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan</u>			1,009,105,000	
<i>CU</i>	<i>PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN</i>			<i>830,102,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			3,710,000	RM
	- PULPEN (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	4.0 KOTAK	45,000	180,000	
	- PULPEN BOLINER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	1.0 KOTAK	201,000	201,000	
	- PENSIL 2B (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	5.0 KOTAK	45,000	225,000	
	- TINTA PRINTER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	9.0 BTL	80,000	720,000	
	- KERTAS A4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	10.0 RIM	52,000	520,000	
	- CETAK BUKU KERTAS KERJA (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	35.0 BUKU	26,000	910,000	
	- JILID (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	30.0 BUKU	30,000	900,000	
	- KERTAS F4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN) [1 RIM]	1.0 RIM	54,000	54,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			752,892,000	RM
	- Penginapan Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	489,500	105,732,000	
	- Uang Harian Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Penginapan Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	485,000	104,760,000	
	- Uang Harian Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Penginapan Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	480,000	103,680,000	
	- Uang Harian Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN DAN KEGIATAN INSIDENTIL PIMPINAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	320,000	138,240,000	
	- Duk Transportasi Laut/Kapal pemeriksaan dan pengawasan [4 ORG x 10 GIAT x 1 RES]	40.0 OG	600,000	24,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.010-Padang)			73,500,000	RM
	- Uang harian pemeriksaan dan pengawasan [5 ORG x 7 GIAT x 14 STKR x 1 HARI	490.0 HARI	150,000	73,500,000	
JZ	<u>HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN</u>			64,913,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			64,913,000	RM
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,900,000	22,800,000	
	- Honor Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	709,450	8,513,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	700,000	8,400,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN]	72.0 OB	300,000	21,600,000	
	- Honor Operator Persediaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honor Operator Aset [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 5,035,567,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VJ	KEGIATAN 1 PRIORITAS POLRI			114,090,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			45,840,000	RM
	- Makan (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	35,000	4,200,000	
	- Snack (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	17,000	2,040,000	
	- Uang Harian (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	130,000	15,600,000	
	- Investigasi Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 Kali]	12.0 OK	1,000,000	12,000,000	
	- Rapat Penanganan Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 GIAT]	12.0 Giat	1,000,000	12,000,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.010-Padang)			6,300,000	RM
	- Sewa Kendaraan (INVESTIGASI DUMAS TERPADU) [1 Unit x 18 Hari]	18.0 Unit	350,000	6,300,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang)			61,950,000	RM
	- Uang Harian Pamen DALAM KOTA [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian Pama DALAM KOTA [3 Orang x 3 Hari]	9.0 OH	150,000	1,350,000	
	- Uang Harian Bintara DALAM KOTA [1 Orang x 3 Hari]	3.0 OH	150,000	450,000	
	- Uang Harian Pamen LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 18 Hari]	18.0 OH	380,000	6,840,000	
	- Uang Harian Pama LUAR KOTA DALAM PROVINSI [3 Orang x 18 Hari]	54.0 OH	380,000	20,520,000	
	- Uang Harian Bintara LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 18 Hari]	18.0 OH	380,000	6,840,000	
	- Penginapan Pamen LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 17 Malam]	17.0 OH	300,000	5,100,000	
	- Penginapan Pama LUAR KOTA DALAM PROVINSI [3 Orang x 17 Malam]	51.0 OH	300,000	15,300,000	
	- Penginapan Bintara LUAR KOTA DALAM PROVINSI [1 Orang x 17 Malam]	17.0 OH	300,000	5,100,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

PADANG, 31 Januari 2023

ARIF RAHMAN HAKIM,S.H.

NRP 66050542